

Pengaruh Koneksi Politik, Opini Audit, dan CEO Power Terhadap Keterungkapan Korupsi (Studi pada BUMN yang terdaftar di BEI tahun 2019-2022)

Indonesian Journal of
Auditing and
Accounting (IJAA)
2025, Vol 2 (2) 9-24
e-ISSN: 3032-6273
www.jurnal.iapi.or.id

Sonia Angela Riawan^{1*}, Elly Suryani²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Telkom University, Bandung, 40257

*angelariawan@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Koneksi Politik, Opini Audit, dan *CEO Power* terhadap keterungkapan korupsi pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2019–2022. Teknik *sampling* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* dengan sampel sebanyak 30 perusahaan BUMN atau 120 data pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019–2022. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan analisisnya menggunakan analisis regresi logistik dengan menggunakan aplikasi SPSS 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koneksi politik, opini audit, dan *CEO power* berpengaruh secara simultan terhadap keterungkapan korupsi. Selain itu, koneksi politik secara parsial tidak berpengaruh terhadap keterungkapan korupsi. Opini audit secara parsial berpengaruh negatif terhadap keterungkapan korupsi, sedangkan *CEO Power* secara parsial berpengaruh positif terhadap keterungkapan korupsi.

Kata Kunci: *CEO Power*, Koneksi Politik, Keterungkapan Korupsi, Opini Audit.

Pendahuluan

Korupsi di Indonesia telah menjadi budaya sejak era Orde Lama, Orde baru, sampai dengan era Reformasi. Namun, korupsi di Indonesia semakin banyak pada tahun 1997 saat negara mengalami krisis ekonomi, politik, dan sosial yang akhirnya menjadi krisis multidimensi. Pada era reformasi dibentuk lembaga independen yaitu komisi pemberantasan korupsi (KPK) yang berfungsi untuk memberantas korupsi. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menjelaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga negara dalam kelompok kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen serta bebas dari pengaruh kekuasaan manapun (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2023). Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

menjelaskan bahwa korupsi merupakan tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh setiap orang atau korporasi untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Badan Pemeriksa Keuangan, 2023). Menurut Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), korupsi terbagi dalam pertentangan kepentingan (*conflict of interest*), suap (*bribery*), pemberian *illegal (illegal gratuity)*, dan pemerasan (*economic extortion*). Berdasarkan hasil survei ACFE Indonesia tahun 2019 terhadap 239 responden menunjukkan bahwa fraud yang paling banyak terjadi di Indonesia adalah korupsi, dengan persentase sebesar 64,4%. Menurut data dari ACFE (2022), korupsi yang mencakup pelanggaran seperti penyuapan, konflik kepentingan, dan pemerasan dengan skema ini terjadi pada 50% kasus dan menyebabkan kerugian rata-rata sebesar USD 150.000 (Association of Certified Fraud Examiners, 2022).

Beberapa kasus korupsi yang pernah terjadi yaitu Direktur Keuangan PT. Angkasa Pura II (Persero) menerima hadiah atau uang dari Andi Taswin Nur selaku perantara pemberi terkait dengan pengadaan pekerjaan Baggage Handling System (BHS) pada PT. Angkasa Pura Propertindo yang dilaksanakan oleh PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) tahun 2019 yang bertentangan dengan kewajibannya (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2023). Berikutnya yaitu pemberian hadiah atau uang dan janji atas nama tersangka DMP selaku Direktur Utama PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) bersama dengan Andi Taswin Nur, dan kawan-kawan kepada Andra Yastrialsyah Agussalam selaku Direktur Keuangan PT. Angkasa Pura II (Persero) terkait dengan Pekerjaan di PT. Angkasa Pura II (Persero) dan PT. Angkasa Pura Propertindo Tahun 2018 dan 2019 yang bertentangan dengan kewajibannya (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2023). Kasus lain yang terjadi yaitu pemberian hadiah atau janji yang dilakukan oleh tersangka KSU dan kawan-kawan kepada Wisnu Kuncoro selaku Direktur Teknologi dan Produksi PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk. dan kawan-kawan, terkait dengan pengadaan barang dan jasa pada PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk pada tahun 2019 (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2023).

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keterungkapan korupsi. Pertama yaitu koneksi politik. Koneksi politik antara direktur perusahaan dengan pejabat pemerintahan dapat mempengaruhi kebijakan yang ditetapkan suatu perusahaan. Koneksi politik perusahaan dapat mempengaruhi pengambilan risiko perusahaan. Koneksi politik yang melekat pada BUMN berfungsi sebagai mekanisme penghindaran risiko (Widyaningrum & Wijayanti, 2022). Korupsi dapat menghambat penyelidikan dan penuntutan terhadap kasus-kasus korupsi karena koruptor dapat memanfaatkan koneksi politik atau keuangan mereka untuk menghindari pertanggungjawaban (Nurrizqilah Putri et al., 2024). Hasil penelitian Karundeng & Pesak (2023) menyatakan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap keterungkapan korupsi, dan penelitian Nguyen (2023) menyatakan koneksi politik berpengaruh negatif terhadap keterungkapan korupsi, sedangkan pada penelitian Masud et al. (2019) menyatakan bahwa koneksi politik berpengaruh positif terhadap keterungkapan korupsi.

Adapun faktor berikutnya yaitu opini audit. Opini Audit merupakan pernyataan profesional pemeriksaan mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Meskipun Kantor Akuntan Publik memberikan opini wajar, masih terdapat kemungkinan terjadi salah saji material sehingga mengindikasikan dapat terjadi

korupsi. Hasil penelitian Safira Syahrir & Suryani (2020) dan Panji & Utomo (2023) menyatakan bahwa opini audit berpengaruh negatif terhadap keterungkapan korupsi, sedangkan pada penelitian Triya Setia Ningsih & Haryanto (2022) opini audit tidak memiliki pengaruh terhadap keterungkapan korupsi.

Faktor yang terakhir yaitu *CEO power*. *CEO Power* dianggap sebagai pemusatan kekuasaan ada di tangan CEO, yang mengukur seberapa besar kekuasaan pengambilan keputusan oleh CEO (Pour et al., 2023). KPK sudah beberapa kali memberikan peringatan mengenai rawannya pejabat yang memiliki rangkap jabatan sebagai komisaris di BUMN. Tingginya kemungkinan konflik kepentingan akibat rangkap jabatan dapat menjerumuskan orang kepada tindak pidana korupsi. Hasil penelitian Widyatama & Setiawati (2020) dan Carrillo et al. (2019) menyatakan bahwa *CEO power* berpengaruh positif terhadap keterungkapan korupsi, dan pada penelitian Purnama & Suryani (2019) menyatakan bahwa *CEO power* tidak memiliki pengaruh signifikan pada keterungkapan korupsi, sedangkan pada penelitian La Rosa et al. (2022) menyatakan bahwa *CEO power* berpengaruh negatif.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti apakah koneksi politik, opini audit dan *CEO power* berpengaruh secara parsial maupun simultan terhadap keterungkapan korupsi pada BUMN. Oleh karena itu, judul penelitian yang diambil oleh penulis adalah "Pengaruh Koneksi Politik, Opini Audit, dan *CEO Power* Terhadap Keterungkapan Korupsi (Studi pada BUMN yang terdaftar di BEI tahun 2019-2022)".

Studi Pustaka dan Pengembangan Hipotesis

Teori Agensi

Menurut Jensen & Meckling (1976) dalam Azzahara et al. (2020) teori keagenan merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen, yaitu antara kelompok atau organisasi, dua individual tau lebih untuk melakukan pekerjaan atas nama prinsipal. Teori agensi berkepentingan dengan menyelesaikan dua masalah yang dapat terjadi dalam hubungan agensi. Pertama masalah agensi yang ada ketika keinginan atau tujuan dari konflik prinsipal dan agen. Sulit bagi prinsipal untuk membuktikan perbuatan agen yang sesungguhnya. Kedua, masalah pembagian risiko yang ada ketika prinsipal dan agen memiliki sikap yang berbeda terhadap risiko (Amarakamini & Suryani, 2019). Pendekatan prinsipal dan agen merupakan teori yang tepat untuk menggambarkan keterungkapan korupsi. Masalah keagenan muncul ketika pihak-pihak dalam suatu perusahaan mengejar tujuan yang saling bertentangan (tujuan konflik). Baik prinsipal maupun agen diasumsikan sebagai pemikir yang rasional. Akibatnya, mereka hanya memperhatikan kepentingan terbaik mereka sendiri (*self interest*), yang membuat mereka berhati-hati dalam mengambil risiko yang dapat membahayakan kepentingan tersebut. Kondisi inilah yang menyebabkan munculnya konflik kepentingan antara prinsipal dan agen, dimana antara prinsipal dan agen ingin memaksimalkan kesejahteraan masing-masing dengan informasi yang dimiliki (Anisa & Suryani, 2020).

Korupsi pada BUMN dapat dijelaskan dengan pendekatan teori agensi. Pemisahan kepemilikan dan pengelolaan BUMN menimbulkan konflik agensi antara prinsipal (negara) dan agen (manajemen BUMN). Manajemen BUMN yang diberikan wewenang

untuk mengelola BUMN terkadang memiliki perbedaan kepentingan dengan prinsipal, bahkan sering menyimpang dari kepentingan prinsipal. Ketika seorang individu berperilaku dengan cara yang menguntungkan dirinya sendiri (agen) dengan mengorbankan negara (prinsipal), hal ini dapat memicu terjadinya korupsi.

Teori Fraud

Fraud menurut ACFE adalah aktivitas apapun yang mengandalkan penipuan untuk mencapai keuntungan. Di dalamnya termasuk unsur-unsur tak terduga, tipu daya, licik, dan tidak jujur yang merugikan orang lain (Association of Certified Fraud Examiners, 2022). Menurut Albrecht & Albrecht (2004:5) *Fraud* adalah suatu pengertian umum dan mencakup berbagai cara yang dapat digunakan dengan cara kekerasan oleh seorang untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain melalui perbuatan yang tidak benar. Jenis *fraud* menurut ACFE (2022) dibagi menjadi tiga kategori utama yang sering dilakukan, yaitu:

1. *Corruption* (korupsi) adalah pelanggaran seperti konflik kepentingan, penyuapan, dan penyuapan. Korupsi termasuk kelompok tengah dalam segi frekuensi dan kerugian yang terjadi pada 50% kasus dan menyebabkan kerugian sebesar USD150.000.
2. *Asset Misappropriation* (penyalahgunaan aset) adalah pencurian atau penyalahgunaan sumber daya perusahaan oleh karyawan. Penyalahgunaan aset merupakan kasus yang sering terjadi dengan 86% kasus dan cenderung menimbulkan kerugian terendah sebesar USD100.000 per kasus.
3. *Financial Statement Fraud* (kecurangan laporan keuangan) adalah salah saji atau kelalaian yang material dalam laporan keuangan dan disengaja oleh pelaku. Kecurangan laporan keuangan merupakan kategori yang tidak umum dengan 9% kasus, namun termasuk kategori yang paling mahal dengan USD593.000.

Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya *fraud* yang telah diteliti oleh beberapa ahli, yaitu *fraud triangle*, *fraud diamond*, *fraud pentagon*, dan *fraud hexagon*. *Fraud triangle* pertama kali dicetuskan oleh Cressey (1953), kemudian dilanjutkan oleh Wolfe & Hermanson (2004) yang mengemukakan *fraud diamond*. Selanjutnya, Crowe (2011) mengemukakan *fraud pentagon*. Kemudian, Vousinas (2019) mengembangkan pendekatan *fraud* terbaru yang disebut *fraud hexagon*. Menurut Cressey (1953) teori segitiga didukung oleh tiga unsur yaitu adanya tekanan, kesempatan, dan pembenaran. Tiga unsur tersebut digambarkan sebagai berikut:

1. Tekanan (*pressure*).
Menurut SA 240, tekanan atau insentif merupakan tekanan untuk melakukan kecurangan pelaporan keuangan yang muncul ketika manajemen berada dalam tekanan baik dari luar maupun dalam perusahaan (IAPI, 2022).
2. Kesempatan (*opportunity*).
Menurut SA 240, peluang untuk melakukan kecurangan mungkin ada jika individu percaya bahwa pengendalian internal dapat diabaikan (IAPI, 2022).
3. Pembenaran (*rationalization*).
Menurut SA 240, individu dapat mengemukakan alasan untuk pembenaran tindakan kecurangan. (IAPI, 2022).

Faktor *fraud* berikutnya yaitu *fraud diamond*. Wolfe & Hermanson (2004) mengemukakan *fraud diamond* dengan unsur *pressure, opportunity, rationalization*, dan *capability*. *Capability* individu sebagai sifat dan kemampuan pribadi yang memainkan peran utama dalam memperhatikan tiga elemen lainnya (Wolfe & Hermanson, 2004). Faktor *fraud* berikutnya yaitu *fraud pentagon*. *Fraud pentagon* merupakan perkembangan dari teori *fraud triangle* yang dicetuskan oleh Cressey (1953) dan *fraud diamond* yang dikembangkan oleh Wolfe dan Hermanson (2004). Crowe (2011) menambahkan arogansi (*arrogance*) dalam teori *fraud pentagon*. Arogansi muncul karena kurangnya sifat hati nurani pada seseorang yang menganggap bahwa pengendalian internal tidak dapat diberlakukan kepada dirinya karena mempunyai jabatan penting dalam suatu perusahaan keuangan (Ariandini & Suryani, 2020). Faktor *fraud* berikutnya yaitu *fraud hexagon*. Vousinas (2019) mengembangkan pendekatan *fraud* dengan menambahkan unsur kolusi sehingga teori ini disebut *fraud hexagon*. Kolusi (*collusion*) menurut Agoes (2017:227) adalah kecurangan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang dengan cara bekerja sama dengan tujuan untuk menguntungkan orang-orang tersebut dan biasanya merugikan perusahaan atau pihak ketiga. Kolusi merujuk kepada perjanjian yang menipu suatu pihak dimana pihak yang tertipu sebanyak dua orang atau lebih, untuk satu pihak yang bertujuan untuk mengambil tindakan lain untuk beberapa tujuan kurang baik, seperti menipu pihak ketiga dari hak yang dimilikinya (Vousinas, 2019).

Keterungkapan Korupsi

Korupsi menurut Agoes (2017:229) adalah perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang dengan tujuan untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang melanggar norma-norma yang berlaku yang merugikan negara dan masyarakat. Korupsi dalam *fraud tree* dibagi menjadi empat yaitu *conflict of interest, bribery, illegal gratuities*, dan *economic extortion* (Association of Certified Fraud Examiners, 2022):

1. *Conflict of interest* (pertentangan kepentingan).
Bentuk korupsi ini terjadi ketika karyawan atau manajer mempunyai kepentingan pribadi yang dirahasiakan dalam suatu hal yang dapat mempengaruhi peran profesionalnya (Association of Certified Fraud Examiners, 2022)
2. *Bribery* (suap).
Suap merupakan permohonan, pemberian, dan penerimaan atas sesuatu yang bernilai untuk mempengaruhi tindakan seseorang atas pekerjaannya. Sesuatu yang bernilai itu berupa uang, pinjaman, hiburan, pelunasan hutang, keuntungan bisnis, fasilitas, dan sebagainya (Karyono, 2013:23). Bentuk suap terdiri atas *invoice kickbacks* dan *bid rigging* (Association of Certified Fraud Examiners, 2022):
 - a. *Invoice kickbacks* terjadi karena terdapat penerimaan atau pemberian sesuatu untuk mempengaruhi keputusan bisnis.
 - b. *Bid rigging* dilakukan untuk memenangkan salah satu penawar dari beberapa penawaran yang mengikuti lelang. Bila kecurangan tersebut berhasil, maka penawar yang menang memberi sesuatu yang bernilai pada panitia perlelangan.
3. *Illegal gratuities* (pemberian tidak sah). Sesuatu yang bernilai dan diberikan kepada pihak lain sebagai imbalan atas keputusan yang telah diambil, bukan dilakukan untuk mempengaruhi sebelum mengambil keputusan tersebut (Association of Certified Fraud Examiners, 2022).

4. *Economic extortion* (pemerasan ekonomi). Karyawan meminta pembayaran dari vendor (rekanan) atas keputusan menguntungkan yang diambil vendor tersebut dengan cara ancaman atau bujukan (Karyono, 2013:24).

Pengaruh Koneksi Politik Terhadap Keterungkapan Korupsi

Salah satu unsur dalam *fraud hexagon* yaitu *collusion* dengan proksi yang dapat diukur menggunakan koneksi politik. Koneksi politik merupakan suatu kondisi yang menjalin suatu hubungan antara pihak tertentu dengan pihak yang memiliki kepentingan dalam politik dan digunakan untuk mencapai suatu hal tertentu yang dapat menguntungkan kedua belah pihak (Lestari et al., 2019). Perusahaan yang memiliki koneksi politik merupakan perusahaan dengan cara tertentu untuk memiliki ikatan secara politik atau mengusahakan adanya kedekatan dengan politisi atau pemerintah (Nurrahmi & Rahayu, 2020). Koneksi politik juga dapat diartikan sebagai hubungan yang terjadi ketika salah satu direktur perusahaan memiliki latar belakang pendidikan yang sama dengan seorang politisi (Widyaningrum & Wijayanti, 2022). Perusahaan milik negara dapat menggunakan jaringan politik mereka dengan pejabat pemerintah untuk mendapatkan informasi tentang saham-saham yang mempunyai *political connection* dan mengalokasikan lebih banyak sumber daya kepada saham tersebut pada perusahaan (He & Kryzanowski, 2023). Seperti yang disampaikan oleh Masud et al. (2019) bahwa koneksi politik merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi. Koneksi politik yang lebih tinggi menciptakan peningkatan kesadaran terhadap adanya korupsi dan berujung dengan penerapan proses keterungkapan korupsi yang lebih baik. Oleh karena itu, semakin banyak koneksi politik dapat mengindikasikan semakin tingginya tingkat keterungkapan korupsi.

Koneksi politik dalam penelitian ini adalah salah satu direksi ataupun komisaris yang pernah atau sedang menjadi anggota legislatif ataupun eksekutif, pejabat di institusi pemerintah atau militer, dan anggota partai politik (Safira Syahrir & Suryani, 2020; Wang et al., 2017). Maka, pengukurannya yaitu kode 1 diberikan jika terdapat koneksi politik dan kode 0 diberikan jika tidak terdapat koneksi politik. Berikut hipotesis dalam penelitian ini:

H₁: Koneksi Politik berpengaruh positif signifikan terhadap keterungkapan korupsi.

Pengaruh Opini Audit Terhadap Keterungkapan Korupsi

Opini audit merupakan kesimpulan dari kewajaran informasi yang sudah diaudit. Opini dikatakan wajar dibidang *auditing* apabila bebas dari keraguan (*free from bias*) dan ketidakjujuran (*dishonesty*), serta informasi yang lengkap (*full disclosure*). Hal ini masih dibatasi oleh konsep materialitas (Safira Syahrir & Suryani, 2020). Opini audit dapat disebut sebagai pendapat yang dikeluarkan auditor mengenai kewajaran laporan keuangan perusahaan dalam semua hal material yang berdasarkan atas kesesuaian penyusunan laporan keuangan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum (Fauzan & Tugiman, 2020). Opini wajar tanpa pengecualian yang dapat diperoleh perusahaan dari KAP (Kantor Akuntan Publik) dapat mencerminkan suatu perusahaan yang tertata dan patuh terhadap peraturan dan perundang-undangan serta pengendalian internal yang baik. Apabila suatu perusahaan bisa menyajikan laporan keuangan dengan opini wajar tanpa pengecualian, hal ini dapat mengindikasikan semakin rendah tingkat

keterungkapan korupsi dalam perusahaan tersebut. Semakin baik jenis opini audit yang diperoleh maka menunjukkan penilaian kinerja yang baik. Kinerja yang dinilai baik dapat menunjukkan rendahnya potensi penyimpangan pada perusahaan. Penelitian oleh Panji & Utomo (2023) dan Safira Syahrir & Suryani (2020) menjelaskan bahwa opini audit berpengaruh negatif terhadap keterungkapan korupsi, sehingga semakin baik jenis opini audit yang diperoleh dapat mengindikasikan semakin rendah tingkat keterungkapan korupsi. Pengukuran opini audit yaitu skor 5 untuk opini Wajar Tanpa Pengecualian, skor 4 untuk opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelas, skor 3 untuk Wajar dengan Pengecualian, skor 2 untuk Tidak Wajar, dan skor 1 untuk Tidak Menyatakan Pendapat. Berikut hipotesis dalam penelitian ini:

H₂: Opini Audit berpengaruh negatif signifikan terhadap keterungkapan korupsi.

Pengaruh CEO Power Terhadap Keterungkapan Korupsi

Salah satu unsur dalam *fraud diamond* yaitu *capability* dengan proksi yang dapat diukur menggunakan CEO Power. CEO Power merupakan otoritas dalam pengambilan keputusan. CEO Power diidentifikasi dengan empat sumber kekuatan, yaitu *structural*, *ownership*, *expert*, dan *prestige power* (Pour et al., 2023):

1. *Structural power* berasal dari posisi CEO dalam hierarki organisasi khususnya terhadap dewan dan memberi CEO wewenang yang lebih besar dalam penyesuaian keputusan untuk mencapai target. CEO yang juga merupakan ketua dewan memiliki kemampuan untuk mengumpulkan pengaruh yang lebih besar pada anggota dewan yang bertanggung jawab untuk menetapkan target (Deore et al., 2023).
2. *Ownership power* mengacu pada saham yang dimiliki oleh keluarga pendiri, manajer, dan karyawan lebih mungkin untuk membantu perusahaan dalam mengurangi biaya keagenan (Shui et al., 2022).
3. *Expert power* berasal dari lingkungan hidup dari pekerjaan manajemen dan R&D sebelumnya dalam mempengaruhi inovasi lingkungan. *Expert power* dapat diperoleh dari keahliannya dalam manajemen eksekutif atau bidang terkait lainnya (Shui et al., 2022).
4. *Prestige power* berasal dari status CEO dan pengaruh yang mencakup organisasi, hubungan sosial, dan jaringan. Misalnya, seorang CEO yang memiliki banyak pengaruh kemungkinan besar merupakan yang paling berwibawa (Deore et al., 2023).

Pada penelitian ini, CEO yaitu direktur utama perusahaan. CEO *power* yang digunakan adalah *structural* yang dapat dilihat dari CEO duality. CEO *duality* merupakan satu orang memegang kekuasaan ganda atau merangkap jabatan (Carrillo et al., 2019). CEO memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan bisnis, seperti bertanggung jawab membuat keputusan strategis untuk memperoleh pangsa pasar yang lebih besar dan peningkatan keuntungan. CEO yang berkinerja tinggi biasanya dikaitkan dengan perilaku etis dan praktik terbaik. Namun, banyak juga contoh CEO yang terlibat dalam korupsi dan penipuan. CEO lebih terkait erat dengan upaya mengejar kepentingan pribadi. Karena itu, beberapa CEO bekerja untuk perusahaan yang menjadi pusat skandal dan korupsi (La Rosa et al., 2022). Hasil penelitian Widyatama & Setiawati (2020) dan (Carrillo et al., 2019) menjelaskan bahwa CEO *power* berpengaruh positif terhadap

keterungkapan korupsi, sehingga membuktikan bahwa kemampuan yang dimiliki pemimpin dapat menjadi salah satu pendorong untuk melakukan tindak korupsi.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka adanya kemampuan berupa wewenang yang dimiliki pemimpin dapat memberikan kemudahan dalam melakukan tindakan korupsi, sehingga semakin tinggi pengaruh CEO *power*, maka semakin tinggi juga tingkat keterungkapan korupsinya. CEO *power* pada penelitian ini yaitu CEO yang merangkap jabatan sebagai komisaris maupun direktur di anak perusahaan atau perusahaan lain (Masud et al. 2019), maka pengukurannya yaitu kode 1 diberikan jika terdapat rangkap jabatan dan kode 0 diberikan jika tidak terdapat rangkap jabatan. Berikut hipotesis dalam penelitian ini:

H3: CEO *Power* berpengaruh positif signifikan terhadap keterungkapan korupsi.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh koneksi politik, opini audit, CEO *power* sebagai variabel independen serta keterungkapan korupsi sebagai variabel dependen.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi dari objek atau subjek yang memiliki karakteristik dan kuantitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan diambil kesimpulannya (Sugiyono, 2018:130). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2019–2022 sejumlah 30 perusahaan. Sampel adalah bagian dari karakteristik dan jumlah populasi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah cara menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2018:138). Pertimbangan kriteria yang digunakan dalam penentuan sampel adalah:

1. Perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI tahun 2019–2022.
2. Perusahaan BUMN yang konsisten menyajikan laporan keuangan selama periode 2019–2022.

Dalam penelitian ini, terdapat sampel sebanyak 30 perusahaan BUMN. Diperoleh 30 perusahaan yang memenuhi kriteria sampel dengan jumlah data penelitian sebanyak 120.

Teknik Pengumpulan Data

Menurut sumbernya, data dikelompokkan menjadi data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang tidak perlu dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Penelitian ini mengambil data sekunder yang dikumpulkan dengan menggunakan metode dokumentasi dan studi kepustakaan, berikut penjelasannya:

1. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan (*financial report*) atau laporan tahunan (*annual report*) pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2019-2022.

2. Studi kepustakaan dilakukan melalui sumber seperti buku, jurnal, artikel, dan penelitian lainnya dengan topik yang relevan.
3. Informasi korupsi yang diperoleh dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penelitian ini menggunakan analisis regresi logistik. Regresi logistik merupakan teknik untuk membuat prediksi terhadap variabel tergantung berskala nominal dengan menggunakan variabel bebas berskala interval. Regresi logistik merupakan bentuk khusus regresi yang diformulasikan untuk memprediksi dan menerangkan satu variabel kategoris biner (Sarwono, 2013:18). Analisis regresi logistik digunakan dalam penelitian ini untuk mengolah data terkait topik penelitian yaitu keterungkapan korupsi yang memiliki *output* berupa terdapat keterungkapan korupsi (Y=1) dan tidak terdapat keterungkapan korupsi (Y=0). Berikut persamaan persamaan regresi logistik menurut (Ghozali, 2018:328):

$$\text{Ln} \frac{p}{1-p} = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \dots + \beta_k X_k \dots (1)$$

Ln	:	Logaritma Natural
P	:	Probabilitas
β_0	:	Koefisien regresi
$\beta_1 \beta_2 \beta_3$:	Koefisien masing-masing variabel independen
X_1	:	Variabel independen 1 (Koneksi Politik)
X_2	:	Variabel independen 2 (Opini Audit)
X_3	:	Variabel independen 3 (CEO Power)

Sehingga, terbentuklah persamaan regresi logistik yang digunakan pada penelitian ini, sebagai berikut:

$$\text{Ln} \frac{\text{Keterungkapan korupsi}}{1 - \text{Keterungkapan korupsi}} = \beta_0 + \beta_1 \text{Koneksi politik} + \beta_2 \text{Opini audit} + \beta_3 \text{CEO power} + e \dots (2)$$

Analisis regresi logistik tidak memerlukan distribusi normal dalam variabel independen (Ghozali, 2018:325). Oleh karena itu, analisis regresi logistik tidak memerlukan tidak memerlukan persyaratan asumsi klasik (Basuki & Prawoto, 2016:103).

Hasil dan Pembahasan

Menilai Keseluruhan Model (Overall Model Fit)

Menilai keseluruhan model dilakukan untuk mengetahui apakah model fit atau tidak terhadap data yang digunakan pada penelitian ini. Data diuji dengan membandingkan nilai -2Log Likelihood Block Number 0 dengan -2Log Likelihood Block Number 1. Jika terdapat penurunan pada nilai, maka data dinyatakan fit.

Tabel 2. Overall Model Fit

Overall model fit (-2Log Likelihood)	
-2Log Likelihood Block Number 0	139,180
-2Log Likelihood Block Number 1	116,140

Sumber: Output SPSS 26 (2024)

Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai *-2Log Likelihood Block Number 0* sebesar 139,180 dan nilai *-2Log Likelihood Block Number 1* sebesar 116,140. Hasil tersebut menunjukkan nilai *-2Log Likelihood* yang menurun sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang dihipotesiskan sudah *fit*.

Menilai Kelayakan Model Regresi

Menilai kelayakan model regresi dapat dilihat dengan menggunakan *Goodness of Fit Test Hosmer and Lemeshow's*. Apabila nilai *Goodness of Fit Test Hosmer and Lemeshow's* lebih besar dibandingkan 0,05, maka hipotesis nol tidak dapat ditolak dan model mampu memprediksi nilai observasinya.

Tabel 3. Hasil Hosmer and Lemeshow Test

Chi-square	df	Sig.
5,164	116,140	0,396

Sumber: Output SPSS 26 (2024)

Tabel 3 merupakan hasil dari *Hosmer and Lemeshow Test* dengan nilai *Chi-square* sebesar 5,164 dan nilai signifikansi sebesar 0,396. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari $\alpha = 0,05$, sehingga model regresi layak digunakan untuk analisis berikutnya.

Koefisien Determinasi

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar variabel independen mampu menjelaskan dan mempengaruhi variabel dependen yang dapat dilihat dengan *Nagelkerke R Square*.

Tabel 4. Hasil Koefisien Determinasi

-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
116,140	0,175	0,254

Pada Tabel 4, data menunjukkan nilai *Cox & Snell R Square* sebesar 0,175 dan nilai *Nagelkerke R Square* sebesar 0,254. Hal ini menandakan bahwa variabel independen dapat menjelaskan variabilitas dari variabel dependen sebesar 25,4% dan selebihnya dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diuji dalam penelitian ini.

Pengujian Hipotesis

Pengujian Pengaruh Simultan

Uji pengaruh simultan atau uji statistik F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen yang dimasukkan secara Bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Variabel independen dinyatakan berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen jika nilai signifikansi pada *Omnibus Test of Model Coefficients* kurang dari 0,05.

Tabel 5. Hasil Uji Simltan

Omnibus Tests of Model Coefficients		
Chi-square	df	Sig.
Step	23,040	<0,001
Block	23,040	<0,001
Model	23,040	<0,001

Sumber: Output SPSS 26 (2024)

Berdasarkan Tabel 5 data menunjukkan *Chi-square* sebesar 23,04 dengan *degree of freedom* sebesar 3. Tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,001, sehingga H0 ditolak dan Ha terima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel koneksi poitik, opini audit, dan CEO *power* berpengaruh secara simultan terhadap keterungkapan korupsi pada BUMN tahun 2019–2022.

Pengujian Pengaruh Parsial

Pengujian secara parsial dilakukan untuk mengetahui hubungan dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Uji ini dapat dilihat dari *variable in the equation*. Jika signifikansi variabel independen kurang dari 0,05, maka variabel independen berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen.

Tabel 6. Hasil Uji Parsial

95%.C.I.for EXP(B)								
	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)	Lower	Upper
Koneksi Politik	0,613	0,546	1,264	1	0,261	1,847	0,634	5,380
Opini Audit	-1,434	0,494	8,435	1	0,004	0,238	0,090	0,627
CEO Power	1,048	0,465	5,085	1	0,024	2,851	1,147	7,0888
Constant	4,383	2,213	3,921	1	0,048	80,062		

Sumber: Output SPSS 26 (2024)

Berdasarkan Tabel 6, maka diperoleh persamaan regresi logistik yang digunakan pada penelitian ini, sebagai berikut:

$$\text{Ln} \frac{\text{Keterungkapan korupsi}}{1 - \text{Keterungkapan korupsi}} = 4,383 + 0,613 \text{ Koneksi politik} + 1,434 \text{ Opini audit} + 1,048 \text{ CEO power} + e$$

Berdasarkan hasil uji signifikansi pada Tabel 6 menjelaskan hasil uji parsial dari hubungan koneksi politik, opini audit, dan CEO power secara parsial. Hasil uji parsial dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai signifikansi variabel koneksi politik adalah 0,261, lebih besar dari $\alpha = 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa $H_0,2$ diterima dan $H_a,2$ ditolak, maka variabel koneksi politik tidak berpengaruh terhadap keterungkapan korupsi di BUMN tahun 2019–2022.
2. Nilai signifikansi variabel opini audit adalah 0,004, lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa $H_0,3$ ditolak dan $H_a,3$ diterima, maka variabel opini audit berpengaruh negatif terhadap keterungkapan korupsi di BUMN tahun 2019–2022.
3. Nilai signifikansi variabel CEO power adalah 0,024 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa $H_0,4$ ditolak dan $H_a,4$ diterima, maka variabel CEO power berpengaruh positif terhadap keterungkapan korupsi di BUMN tahun 2019–2022.

Pembahasan

Pengaruh Koneksi Politik terhadap Keterungkapan Korupsi

Berdasarkan pengujian parsial yang telah dilakukan, hasil menunjukkan bahwa variabel koneksi politik tidak berpengaruh terhadap keterungkapan korupsi di BUMN tahun 2019–2022. Dapat disimpulkan bahwa ada dan tidaknya koneksi politik tidak akan mempengaruhi keterungkapan korupsi, karena para eksekutif akan bertindak berdasarkan prosedur yang ada. Ada atau tidaknya koneksi politik dari komisaris dan direksi tidak dapat mendeteksi *fraud* karena anggota yang memiliki hubungan politik bisa mengurangi arogansinya dan perusahaan yang tidak memiliki hubungan politik tidak kesulitan dalam pendanaan, sehingga tidak memerlukan koneksi politik (Jullani et al., 2020). Dewan dengan koneksi politik yang banyak akan lebih peduli pada reputasi dan status sosial, sehingga mendorong tingkat transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi mengenai korupsi dan koneksi politik yang lebih tinggi menciptakan peningkatan kesadaran akan korupsi dan berujung pada penerapan proses keterungkapan korupsi yang lebih baik (Masud et al., 2019). Koneksi politik tidak berpengaruh terhadap keterungkapan korupsi, karena perusahaan yang terkoneksi politik akan berusaha untuk menjaga pengakuan dan penerimaan dari masyarakat karena perusahaan tersebut juga memiliki kepentingan publik. Oleh karena itu, koneksi politik tidak terkait dengan keterungkapan korupsi karena meskipun direktur utama atau komisaris mempunyai hubungan dengan pejabat pemerintah, hal ini tidak berarti mereka melakukan tindakan kecurangan (Wang et al., 2017)

Pengaruh Opini Audit terhadap Keterungkapan Korupsi

Berdasarkan pengujian parsial yang telah dilakukan, hasil menunjukkan bahwa variabel opini audit berpengaruh negatif terhadap keterungkapan korupsi di BUMN tahun 2019–2022. Penelitian ini menunjukkan bahwa opini yang didapatkan perusahaan terdapat hubungan terbalik terhadap keterungkapan korupsi. Hasil ini sejalan dengan hipotesis yang sudah dirumuskan pada penelitian ini bahwa opini audit mempunyai dampak penting untuk pengguna laporan keuangan. Oleh karena itu, opini yang baik dapat meningkatkan kepercayaan pada laporan keuangan, sedangkan opini yang

diberikan pengecualian menunjukkan adanya permasalahan pada perusahaan tersebut (Djamil & Anggraini, 2023). Hasil penelitian Panji & Utomo (2023) menyatakan bahwa opini audit berpengaruh negatif terhadap keterungkapan korupsi, setiap opini auditor dapat mencerminkan kewajaran yang merepresentasikan tingkat pertanggungjawaban laporan keuangan yang bisa mempersempit celah-celah terjadinya kecurangan. Begitu juga dengan penelitian Safira Syahrir & Suryani (2020) yang menyatakan bahwa opini audit berpengaruh negatif terhadap keterungkapan korupsi, terdapat hubungan terbalik terhadap korupsi yaitu semakin baik jenis opini audit yang diterima, maka semakin rendah tingkat terungkapnya korupsi. Pada penelitian ini, mayoritas perusahaan yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian tidak terdapat keterungkapan korupsi. Hal tersebut membuktikan opini yang didapatkan perusahaan terdapat hubungan terbalik terhadap keterungkapan korupsi.

Pengaruh CEO Power terhadap Keterungkapan Korupsi

Berdasarkan pengujian parsial yang telah dilakukan, hasil menunjukkan bahwa variabel berpengaruh positif terhadap keterungkapan korupsi pada BUMN yang terdaftar di BEI tahun 2019–2022. Penelitian ini menunjukkan bahwa CEO *power* terdapat hubungan yang searah dengan keterungkapan korupsi. Hal ini dapat dikaitkan dengan teori *fraud diamond* yaitu *capability* karena CEO memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan (Wolfe & Hermanson, 2004). Oleh karena itu, dapat diartikan direktur utama yang tidak merangkap jabatan dapat mengurangi tingkat keterungkapan korupsi. Hasil ini sejalan dengan hipotesis yang sudah dirumuskan pada penelitian ini dan dapat disimpulkan bahwa CEO yang tidak merangkap jabatan cenderung tidak ada keterungkapan korupsi. Hasil penelitian Widyatama & Setiawati (2020) dan (Carrillo et al., 2019) menyatakan bahwa CEO *power* berpengaruh positif terhadap keterungkapan korupsi, karena ketika ada konflik hubungan dalam rangkap jabatan mengindikasikan semakin besar kemungkinan adanya keterungkapan korupsi.

Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari koneksi politik, opini audit, dan CEO *power* terhadap keterungkapan korupsi pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2019-2022. Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan penelitian menunjukkan koneksi politik, opini audit, CEO *power* berpengaruh secara simultan terhadap keterungkapan korupsi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama koneksi politik, opini audit, dan CEO *power* dapat bekerja untuk mengungkap terjadinya tindakan korupsi. Hasil pengujian parsial menunjukkan koneksi politik tidak berpengaruh terhadap keterungkapan korupsi, sehingga dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat koneksi politik, mengindikasikan hal tersebut tidak akan mempengaruhi adanya keterungkapan korupsi. Berikutnya, opini audit berpengaruh negatif terhadap keterungkapan korupsi, sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin baik jenis opini yang diperoleh perusahaan, dapat mengindikasikan semakin rendah tingkat terungkapnya korupsi. Selanjutnya, CEO *power* berpengaruh positif terhadap keterungkapan korupsi, sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pengaruh CEO *power*, maka semakin tinggi juga keterungkapan korupsi.

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini yaitu kurangnya data korupsi yang terungkap dan diungkapkan dalam laman KPK dan dari pengungkapan indeks korupsi lainnya, maka disarankan untuk menambah sampel dan sektor perusahaan lainnya dan disarankan untuk menambah atau mencari proksi variabel independen lainnya serta menambah jumlah sampel yang akan diteliti. Berdasarkan kesimpulan yang telah ada, maka peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut: Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan untuk melakukan pertimbangan dalam mengambil keputusan sehingga dapat meminimalisir terjadinya tindakan korupsi. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat membantu memahami praktik korupsi sehingga dapat mencegah terjadinya tindakan korupsi.

Daftar Pustaka

- Agoes, S. (2017). *Auditing: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik* (E. S. Suharsi, Ed.; 5th ed., Vol. 2). Salemba Empat.
- Albrecht, S., & Albrecht, C. (2004). *Fraud Examination and Prevention*. Thomson.
- Amarakamini, N. P., & Suryani, E. (2019). Pengaruh Fraud Pentagon Terhadap Fraudulent Financial Statement Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2016 Dan 2017. *Jurnal Akuntansi*, 7(2), 125–136.
- Anisa, & Suryani, E. (2020). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba (Studi pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode The Effect Of Corporate Governance On The Earning Management (Study On Banking Companies Listed On the Indonesian Stock Exchange Period 2016-2018). *E-Proceeding of Management*, 7(1), 756.
- Ariandini, S., & Suryani, E. (2020). The Effect Of Pentagon Fraud In Detecting Frudulent Financial Reporting (Study on Manufacturing Sector Companies Listed in Indonesia Stock Exchange Period 2017-2018). *E-Proceeding of Management*, 7(2), 2864.
- Association of Certified Fraud Examiners. (2022). *Occupational Fraud 2022: A Report To The Nations*. [online]. Tersedia: <https://www.acfe.com/>. (26 Februari 2024)
- Azzahara, S., Nurbaiti, A., & Wiwin, A. (2020). Pengaruh Akuntabilitas, Temuan Audit, dan Tindak Lanjut Hasil Audit Terhadap Tingkat Korupsi. *E-Proceeding of Management*, 7(2), 2659.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Pertumbuhan PDB Indonesia*. [online]. <https://www.bps.go.id/> (26 Februari 2024)
- Basuki, A., & Prawoto, N. (2016). *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis* (1st ed.). PT RajaGrafindo Persada.
- Carrillo, M. I. A., De La Cruz, A. M. P., & Chicharro, M. N. (2019). The impact of corporate governance on corruption disclosure in European Listed Firms through the implementation of directive 2014/95/EU. *Sustainability (Switzerland)*, 11(22). <https://doi.org/10.3390/su11226479>
- Deore, A., Mahlendorf, M. D., & Wu, F. (2023). CEOs' structural power, prestige power, and target ratcheting. *Accounting, Organizations and Society*, 110. <https://doi.org/10.1016/j.aos.2023.101469>
- Dewi, K., & Anisykurlillah, I. (2021). Analysis of the Effect of Fraud Pentagon Factors on Fraudulent Financial Statement with Audit Committee as Moderating Variable. *Accounting Analysis Journal*, 10(1), 39–46. <https://doi.org/10.15294/aa.v10i1.44520>
- Djamil, N., & Anggraini, M. (2023). Suppressing the Level of Corruption in Kampar District: A Study of The Impact of Accountability, Audit Opinions, Publication of Financial Statements, Audit Results And Follow-Up Of Audit Results Nasrullah Djamil Maiza Anggraini. *International Journal of Business and Accounting*, 1(1), 11–25. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10538909>

- Fauzan, Y. M., & Tugiman, H. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Opini Audit Going Concern. *E-Proceeding of Management*, 7(2).Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 (9th ed.). Universitas Diponegoro.
- Hardinto, W., Urumsah, D., Wicaksono, A. P., & Cahaya, F. R. (2020). Sisi Gelap Pemimpin Dalam Memotivasi Tindakan Korupsi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(2). <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.2.20>
- He, C., & Kryzanowski, L. (2023). Political connections, corruption, and investmen decisions of Chinese mutual funds. *The British Accounting Review*, 101300. <https://doi.org/10.1016/j.bar.2023.101300>
- IAPI. (2022). Standar Audit. [online]. <https://iapi.or.id/cpt-special-content/standar-audit-sa/> (1 Maret 2024)
- Ibrahim, M. Y., & Khomsiyah. (2024). The Influence of Audit Opinions and Audit Findings on the Level of Regional Government Corruption in Indonesia. *International Journal of Business and Quality Research*, 2(3), 171–179. <https://ejournal.citakonsultindo.or.id/index.php/IJBQR>
- Jullani, Mukhzarudfa, & Yudi. (2020). Deteksi Fraudulent Financial Reporting Dengan Menggunakan Perspektif Teori Fraud Pentagon. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Universitas Jambi*, 5(3), 158–168. <https://online-journal.unja.ac.id/jaku>
- Kabila, F. F. B., & Suryani, E. (2019). Pengaruh Financial Target, Nature Of Industry, Opini Audit Dan Pergantian Direksi Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan. *E-Proceeding of Management*, 6(3). www.bi.go.id
- Karundeng, F. E. F., & Pesak, P. J. (2023). Moderasi Transparansi Media Sosial pada Pengaruh Koneksi Politik terhadap Indikasi Kecurangan Laporan Keuangan. *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 2(1).
- Karyono. (2013). *Forensic Fraud* (D. Hardjono, Ed.; 1st ed.). ANDI. Komisi Pemberantasan Korupsi. (2023). *Penyidikan dan Penindakan Korupsi*. [online]. <https://www.kpk.go.id/> (26 Februari 2024)
- La Rosa, F., Bernini, F., & Terzani, S. (2022). Does corporate and country corruption risk affect CEO performance? A study of the best-performing CEOs worldwide. *European Management Journal*, 40(2), 234–246. <https://doi.org/10.1016/j.emj.2021.05.002>
- Lestari, P. A. S., Pratomo, D., & Asalam, A. G. (2019). Pengaruh Koneksi Politik dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 11(1), 41–54. <https://doi.org/10.17509/jaset.v11i1.15772>
- Masud, M. A. K., Bae, S. M., Manzanares, J., & Kim, J. D. (2019). Board directors' expertise and corporate corruption disclosure: The moderating role of political connections. *Sustainability (Switzerland)*, 11(16). <https://doi.org/10.3390/su11164491>
- Nguyen, H. Q. (2023). Corruption, political connection, and firm investments *International Review of Financial Analysis*, 90, 102864. <https://doi.org/10.1016/j.irfa.2023.102864>
- Nurrahmi, A. D., & Rahayu, S. (2020). Pengaruh Strategi Bisnis, Transfer Pricing, Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance (Studi pada Perusahaan di Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Akuntansi & Ekonomi FE. UN PGRI Kediri*, 5(2).
- Nurrizqilah Putri, A., Fernando, R., Lusiana Putri, C., Muhammed Alkasadi, S., & Nurrohmat, D. (2024). Pengaruh Korupsi Dalam Perkembangan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(3), 50–57. <https://doi.org/10.62017/merdeka>
- Panji, I., & Utomo, D. C. (2023). Pengaruh Opini Audit Dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 12(2), 1–9. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Permatasari, L. W., Koeswoyo, P. S., & Irawady, C. (2023). Pengaruh Kualitas Auditor Internal dan Efektivitas Komite Audit terhadap Korupsi Di BUMN. *Owner*, 7(3), 2640–2655. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1464>

- Pour, E. K., Uddin, M., Murinde, V., & Amini, S. (2023). CEO power, bank risk-taking and national culture: International evidence. *Journal of Financial Stability*, 67. <https://doi.org/10.1016/j.jfs.2023.101133>
- Purnama, L. R., & Suryani, E. (2019). Pengaruh Fraud Diamond Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016 s.d 2017). *Jurnal Akuntansi*, 8(1), 14–25.
- Roiston, T. A., & Harymawan, I. (2022). CEO Duality, Ownership, and Readability of Financial Statement Footnotes: Some Evidence from Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 9(2), 149–168. <https://doi.org/10.24815/jdab.v9i2.25569>
- Safira Syahrir, R., & Suryani, E. (2020). Pengaruh Opini Audit dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Korupsi. *Journal Accounting and Finance*, 4(1), 20–28. <https://journals.telkomuniversity.ac.id/jaf>
- Sarwono, J. (2013). *Statistik Multivariat Aplikasi untuk Riset Skripsi* (N. WK, Ed.; 1st ed.). ANDI.Shui, X., Zzhang, M., Smart, P., & Ye, F. (2022). Sustainable corporate governance for environmental innovation: A configurational analysis on board capital, CEO power and ownership structure. *Journal of Business Research*, 149, 786–794.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif* (1st ed.). Alfabeta.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif* (3rd ed.). Alfabeta, cv.
- Suryani, E., & Fajri, R. R. (2022). Fraud Triangle Perspective: Artificial Neural Network Used in Fraud Analysis. *Quality - Access to Success*, 23(188), 154–162. <https://doi.org/10.47750/QAS/23.188.22>
- Triya Setia Ningsih, S., & Haryanto. (2022). Pengaruh Temuan Audit, Opini Audit Dan Transparansi Terhadap Tingkat Korupsi. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 11(4), 1–11. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Vousinas, G. L. (2019). Advancing theory of fraud: the S.C.O.R.E. model. *Journal of Financial Crime*, 26(1). <https://doi.org/10.1108/JFC-12-2017-0128>
- Wang, Z., Chen, M. H., Chin, C. L., & Zheng, Q. (2017). Managerial Ability, Political Connections, and Fraudulent Financial Reporting in China. *Journal of Accounting and Public Policy*, 36(2), 141–162. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2017.02.004>.
- Wicaksono, G. S., & Prabowo, T. J. W. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Korupsi pada Pemerintah Daerah di Jawa Tengah Menggunakan Teori Fraud Triangle. *Owner*, 6(1). <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.710>.
- Widyaningrum, D., & Wijayanti, D. M. (2022). Pengaruh Political Connection dan Local Corruption terhadap Corporate Cash Holding di Indonesia. *Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi)*, 21(1), 26–38. <https://doi.org/10.22225/we.21.1.2022.26-38>.
- Widyatama, W., & Setiawati, L. W. (2020). Analisis Pengaruh Fraud Pentagon Theory terhadap Fraudulent Financial Reporting Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2019. *Balance: Jurnal Akuntansi, Auditing Dan Keuangan*, 17(1), 22–47.
- Wolfe, D. T., & Hermanson, D. R. (2004). The Fraud Diamond: Considering the Four Elements of Fraud. <https://digitalcommons.kennesaw.edu/facpubs>.